

MENANGKAL KORUPSI DENGAN MEMAHAMI *FRAUD TRIANGLE*



Oleh : Juli Winarto, Ak. MM, CA
Widyaiswara
Badan Diklat Pemprov. Jawa Timur

Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan indeks yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI telah digunakan oleh banyak negara sebagai rujukan tentang situasi korupsi dalam negeri dibandingkan dengan negara lain. Skor CPI mempergunakan skala 0-100. Nilai atau skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih.

Pada tanggal 27 Januari 2016, melalui web-nya *Transparency International* (TI) mengumumkan *Corruption Perception Index* (CPI) 2015. Pada tahun 2015, enam negara yang memperoleh skor tertinggi adalah Denmark (Skor 91/ Peringkat 1), Finlandia (Skor 90/ Peringkat 2), Swedia (89/peringkat 3), Selandia Baru (88/ peringkat 4), dan Netherlands (87/ peringkat 5), dan Norwegia (87/ peringkat 6). Sedangkan lima negara dengan skor terendah adalah Sudan Selatan (15/ peringkat 164), Sudan (12/ peringkat 165), Afghanistan (11/ peringkat 166), Korea Utara (8/ peringkat 167) dan Somalia (8/ peringkat 168).

Indonesia memperoleh skor 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor Indonesia naik sedikit sebesar 2 poin (pada tahun 2014 Indonesia memperoleh skor 34), tetapi peringkatnya naik cukup tinggi sebanyak 19 peringkat dari tahun sebelumnya (pada tahun 2014, Indonesia diperingkat 109). Kenaikan tersebut antara lain disebabkan adanya perbaikan-perbaikan dalam tata kelola pelayanan publik. Perbaikan tersebut merupakan usaha yang saling bersinergi antara KPK, masyarakat dan para pelayan masyarakat (baca :

ASN dan Pejabat). Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2013 Indonesia memperoleh skor 32 dan menempatkan Indonesia pada urutan ke-114.

Data CPI tahun 2015 untuk negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Peringkat dan Skor Corruption Perception Index 2015

Peringkat Regional	Peringkat Global	Negara	Skor
2	8	Singapore (Ranking Turun, Skor Turun)	85
9	54	Malaysia (Ranking Turun, Skor Turun)	50
11	76	Thailand (Ranking Turun, Skor Tetap)	38
15	88	Indonesia (Ranking Naik, Skor Naik)	36
16	95	Philippines (Ranking Turun, Skor Turun)	35
17	112	Vietnam (Ranking Naik, Skor Tetap)	31
24	147	Myanmar (Ranking Turun, Skor Naik)	22

Sumber: Corruption Perception Index 2015

(sumber data : web Transparency International (TI) yang diakses tgl 14/10/2016)

Sementara itu dari 11 Kota di Indonesia yang disurvei TI, Banjarmasin terbersih dan Bandung terkorup dengan skor masing-masing 68 dan 39. Surabaya ada pada level 65 dan Jakarta 57. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dimotori KPK kurang bisa mengungkit indeks persepsi korupsi di Indonesia. Hal ini terjadi karena fenomena korupsi sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari kita.

Dalam Kamus John M. Echols/ Hasan Shadily arti kata *fraud* adalah :

“penipuan/gadungan/ kecurangan/ penggelapan”

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (*online* <http://kbbi.web.id/korupsi>), Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Sedangkan pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta) adalah sebagai perbuatan curang, dapat disuap, dan tidak bermoral.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan bagian dari *fraud*. Karena itu yang berlaku pada kejadian *fraud*, juga berlaku dalam korupsi.

Dalam dunia “perkorupsian” terdapat banyak teori yang mengemuka, antara lain teori GONE (Greed, Opportunity, Need, Exposes), *Fraud Triangle*, *Fraud Diamond Model* dan masih banyak lagi. Penulis ingin mengulas salah satu teori saja yang cukup terkenal yaitu teori *Fraud Triangle* yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressey. Teori ini muncul dari disertasi beliau pada tahun 1953 dan dipublikasikan dalam buku yang berjudul “*Other People’s Money*”.

Menurut teori ini, terdapat tiga pendorong utama orang melakukan tindakan *fraud* (baca : korupsi), yaitu Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi. Masing-masing faktor pendorong tersebut memiliki pencegahan yang berbeda-beda. Apabila faktor pendorongnya adalah tekanan, maka tindakan pencegahannya adalah menegakkan hukum. Apabila faktor pendorongnya karena adanya kesempatan, maka upaya pencegahannya adalah pembangunan atau perbaikan sistemnya. Dan apabila faktor pendorongnya rasionalisasi, maka upaya pencegahannya adalah peningkatan etika dan moral. Hal ini nampak seperti dalam gambar dibawah ini :



Sumber data : Donald R. Cressey, *others people money, A study in the social psychology of Embezzlement*.

Rationalization

Rasionalisasi membantu pelaku korupsi untuk menyembunyikan ketidak-jujuran perbuatannya atau dengan kata lain merupakan alasan pembenaran bagi pelaku korupsi. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Rasionalisasi biasanya merupakan kejadian awal pertama

kali dan koruptor insidental. Awalnya dia tidak benar-benar berniat untuk korupsi, hanya karena alasan tersebut dia mengambil yang bukan haknya. Namun, lama kelamaan alasan pembenaran tersebut memudar, sehingga dia tidak perlu lagi adanya alasan pembenaran tersebut untuk mengambil yang bukan haknya.

Contoh rasionalisasi yang biasa dipakai oleh pelaku kecurangan/korupsi adalah :

- Organisasi berhutang kepada saya;
- Saya hanya meminjamnya, nanti akan saya kembalikan;
- Tidak ada yang akan terluka atau rugi dengan perbuatan ini;
- Saya seharusnya menerima lebih dari ini karena saya sudah bekerja ekstra keras;
- Tujuan saya baik, untuk memberi tambahan penghasilan bagi anak buah;
- Kesalahan pembukuan akan segera diperbaiki jika kesulitan keuangan ini sudah teratasi;
- Ada yang harus dikorbankan, integritas saya atau reputasi saya.
- tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya
- Masa kerja pelaku cukup lama dan pelaku merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dll.)

Tekanan atau pressure

Faktor pendorong ini menggerakkan orang untuk melakukan tindakan korupsi. Faktor tekanan dapat berbentuk macam-macam antara lain :

(1) financial pressure (motif ekonomi)

Motif keuangan atau ekonomi ini mendorong orang melakukan korupsi karena hal-hal yang bersifat ekonomi, misalnya adanya hutang atau tagihan yang banyak, memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, butuh uang untuk membeli narkoba dan lain-lain.

(2) vices (sifat jahat/buruk)

Motif sifat jahat ini mendorong orang melakukan korupsi karena memang orang tersebut memiliki sifat yang tidak baik, misalkan hedonis dan ingin bergaya hidup mewah, serakah, ingin menumpuk harta dan lain-lain.

(3) work-related pressure

Hubungan dalam pekerjaan biasanya akan sangat berpengaruh terhadap pelaku korupsi terutama dengan atasan. Biasanya bawahan akan melaksanakan apa saja perintah atasan dengan berbagai alasan mulai rasa segan, tidak enak sampai rasa takut kehilangan jabatan dan lain-lain.

(4) *other pressure*.

Atau bentuk-bentuk tekanan lainnya.

Opportunity atau Kesempatan

Opportunity adalah terjadinya suatu peluang yang memungkinkan fraud atau korupsi timbul. Biasanya disebabkan karena internal control atau sistem suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Misalnya atasan tidak pernah melakukan opname kas kepada bendahara, sehingga bendahara mempunyai kesempatan untuk mengambil uang tunai yang dikuasakan kepadanya dan akan terbongkar setelah lama berselang.

Suatu tindakan korupsi dapat disebabkan salah satu faktor pendorong atau bahkan dapat lebih dari satu elemen sebagai faktor pendorong yang saling bersinergi.

UPAYA PENCEGAHAN

Dalam memberantas korupsi, kita harus memahami *Fraud Triangle* karena dengan keberhasilan kita mengidentifikasi faktor pendorong korupsi, kita dapat memperoleh resep obat yang mujarab sesuai dengan penyebabnya. Pencegahan *fraud* atau korupsi adalah upaya yang terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* dalam *fraud triangle*.

Apabila faktor pendorongnya adalah rasionalisasi, maka upaya pencegahannya adalah meningkatkan moral dan etika pegawai agar mereka lebih berintegritas. Dengan naiknya etika dan moral, maka diharapkan pegawai tersebut dapat berfikir lebih jernih dan tidak mencari pembenaran tindakan koruptifnya. Usaha-usaha untuk meningkatkan moral dan etika pegawai dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menandatangani pakta integritas

dapat menjadi salah satu pilihan. Membudayakan “*zero tolerance to corruption*” adalah cara ampuh yang dapat diterapkan untuk menghilangkan faktor pendorong ini. Contoh dari hal ini adalah memberlakukan “Zona Anti Korupsi”; membuat pin atau stiker “anti suap”; membuat spanduk “No Tips” seperti berlaku di beberapa instansi pemerintah

Apabila faktor pendorongnya adalah tekanan, maka kita harus menghilangkan tekanan dengan penegakan hukum. Seperti contoh diatas, faktor tekanan dari atasan, maka upaya pencegahannya adalah menegakkan hukum sehingga atasan tidak lagi dapat menekan bawahannya atau minimal atasan takut untuk menekan bawahannya.

Apabila faktor pendorongnya karena adanya kesempatan, maka upaya pencegahannya adalah pembangunan sistem atau perbaikan sistem yang sudah ada. Serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan cara jitu menangkal dari penyebab yang ketiga. Dari contoh diatas, sistem pengendalian harus dibangun atau dilaksanakan, yaitu atasan melakukan kas opname terhadap uang yang dikelola oleh bendahara. Dengan demikian akan memperkecil peluang bendahara mengambil uang yang dikelolanya, karena merasa selalu diawasi oleh atasannya. Contoh lainnya adalah penerapan kebijakan “no cash payment” artinya tidak ada lagi pembayaran dengan uang tunai atau semua transaksi melalui perbankan atau sistem transfer.

Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*. Aspek kesempatan (*opportunity*) adalah bagian yang tidak akan pernah lenyap 100% dari penyebab terjadinya korupsi. Bahkan *opportunity* ini terkadang sengaja diciptakan oleh perencana (baca: pimpinan) justru pada saat penyusunan rencana (baca: APBN/APBD), di samping penciptaan *opportunity* dari sisi kebijakan/peraturan.

Pembangunan sistem perlu dilakukan oleh orang yang ahli agar dapat mengenali dan menutup celah-celah yang mungkin dimanfaatkan orang. Tetapi meskipun sistem sudah dibangun sedemikian bagusnya, akan percuma apabila penerapan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena pada hakekatnya, kelemahan sistem yang terbesar adalah apabila sudah terjadi “main mata” atau kongkalikong antar pelaku sistem itu sendiri. Kunci utama sistem adalah terdapat pemisahan fungsi yang memungkinkan terciptanya saling kontrol antar

bagian atau personil. Apabila terjadi “ main mata atau kongkalikong”, maka tidak akan tercipta saling kontrol tersebut. Yang terjadi adalah saling menjaga rahasia artinya agar tidak terjadi “bocor”nya rahasia ke pihak lain. Hahahaha.....

Dengan memahami teori *Fraud Triangle* dapat menjadi sarana yang ampuh bagi kita semua untuk menanggulangi korupsi. Menghilangkan salah satu elemen dari segitiga mengurangi kemungkinan dan frekuensi korupsi, pada akhirnya, akan dapat membantu meningkatkan CPI bagi negara kita yang tercinta.